

Nama : Putri Novianti

NPM : 2216041114

Kelas : Reguler C

KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah berkembang di Indonesia sejak adanya otonomi daerah berupa pembagian atas kekuasaan yang di berikan secara utuh kepada daerah yang bersangkutan untuk mengatur urusan rumah tangganya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat serta upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik (Herlinda, 2020, p. 14). Selain itu, dalam pemenuhan tugas tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan daerah serta tanggung jawab penyelenggaraan dalam pemeliharaan infrastruktur jalan yang berada di bawah kewenangan yang dimilikinya. Hal ini juga harus diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola daerah secara optimal baik dari segi teknik, manajerial dan pembiayaan dalam penyelenggaraan jalan tersebut (Armando Soares, 2015, p. 232).

Indonesia mengamalkan konsep negara kesejahteraan (welfare state) dimana konsep ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945 di alinea ke-empat; *“...Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”*. Pada alinea ini terlihat jelas bahwa negara Indonesia memiliki kewajiban memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang optimal, memberikan

sarana dan prasarana yang memadai untuk masyarakat. Segala kebutuhan dasar masyarakat menjadi tanggung jawab negara seperti memberikan pelayanan dalam pendidikan, pelayanan dalam hal kesehatan, kebutuhan akan administrasi dasar yang berkaitan dengan pembuatan identitas diri, memberikan infrastruktur seperti jalan, dan irigasi ataupun menyediakan sarana transportasi.

Menurut UU No. 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 38 Tahun 2004 pasal 1 ayat (4) mengenai jalan menjelaskan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bentuk bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di atas permukaan tanah atau pun air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Secara umum jalan diartikan sebagai jalur dimana masyarakat mempunyai hak untuk melintasinya tanpa menggunakan izin khusus. Jalan adalah prasarana transportasi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi penunjang atas segala kebutuhan masyarakat baik kebutuhan perekonomian, sosial, politik maupun pertahanan keamanan. Kondisi jalan yang optimal adalah syarat dasar untuk mendukung pertumbuhan di suatu daerah (Virginia Sisilia Mamahit, 2021, p. 12).

Memberikan penyediaan infrastruktur berupa jalan merupakan salah satu tugas dari pemerintah sebagai bentuk menyejahterakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi: “ Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan sebagai instansi yang mendapat tugas dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat menjalankan tugasnya untuk memberikan dan menjaga kualitas dari pelayanan publik tersebut agar tetap optimal.

Akhir-akhir ini kerusakan jalan menjadi permasalahan besar sehingga dijadikan topik utama di berbagai platform media massa nasional. Hal ini diakibatkan banyak ruas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten maupun kota, dan jalan desa yang mengalami kerusakan perkerasan struktural jalan padahal pekerjaan baru saja selesai dan masih pada tahap pemeliharaan oleh pemerintah. Hal ini kebanyakan terjadi sebelum masa layanan berakhir sehingga proses pengelolaan jalan yang selama ini diterapkan masih belum memberikan hasil yang

maksimal. Keadaan ini sudah berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama dimana pemerintah hanya fokus pada upaya memperbaiki infrastruktur jalan dan belum tertuju pada arah bagaimana mempertahankan jalan yang telah ada dan yang hendak dibangun agar tetap pada kondisi yang baik sehingga alokasi biaya yang selama ini dikeluarkan untuk upaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dapat dikurangi dan diganti dengan kepentingan pembangunan infrastruktur lain yang tidak kalah pentingnya untuk penunjang hidup masyarakat. Dalam siklus umur layanan jalan, jalan yang sudah dibangun serta dioperasikan lama kelamaan akan mengalami penurunan kondisi dan tingkat pelayanan jalan. Situasi ini dimulai dengan munculnya kerusakan awal berupa retakan pada permukaan jalan yang lama kelamaan jika tidak segera ditangani akan menimbulkan situasi kerusakan yang lebih besar dari sebelumnya dimana jalan tidak dapat lagi berfungsi secara optimal terutama untuk pelayanan keperluan lalu lintas. Dari hasil beberapa penelitian terdahulu hal ini terjadi saat pemeliharaan jalan dimana umur layanan jalan belum mencapai pada tahap mendekati umur rencana sehingga jalan tersebut akan rusak kembali.

Sukirman (1991) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab kerusakan pada konstruksi perkerasan jalan yaitu repetisi beban kendaraan, sistem drainase jalan yang tidak optimal sehingga air naik ke permukaan jalan akibat sifat kapilaritas, material konstruksi perkerasan jalan yang tidak baik, faktor iklim Indonesia dimana suhu udara serta curah hujan yang tinggi menjadi salah satu indikator penyebab kerusakan jalan, kondisi tanah yang tidak stabil dan proses pemadatan lapisan di atas tanah dasar yang kurang optimal sehingga terjadi pergeseran pada permukaan tanah. Dari semua faktor tersebut, faktor beban kendaraan yang tidak terkendali secara terus menerus jika dikombinasikan dengan genangan air akan menjadi faktor utama terjadinya kerusakan jalan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat dan pengguna jalan berupa naiknya biaya operasional kendaraan (BOK), munculnya ketidaknyamanan dalam berkendara, terjadinya kecelakaan lalu lintas dan berdampak pada perekonomian masyarakat (Asia Foundation, 2008).

Kabupaten Lampung Selatan sudah pasti memiliki kontur wilayah yang tidak sama di setiap Kecamatannya. Hal ini menyebabkan potensi kerusakan jalan pada setiap wilayah pun berbeda-beda dan indikator cuaca, lingkungan serta arus lalu lintas menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap kerusakan jalan.

Menurut data dari Kementerian PUPR periode 2021 di Provinsi Lampung, panjang jalan nasional 1.292,21 km dengan kondisi baik 32,28% (430,06 km), jalan dalam kondisi sedang 60,61% (783,20 km), jalan dalam kondisi rusak ringan 4,38% (56,58 km) dan jalan yang mengalami rusak berat 1,73% (22,37 km). Sementara jalan provinsi 1.693,27 km dengan kondisi baik 64,45% (1.091,24 km), sedang 11,60% (196,40 km), rusak ringan 14,14% (239,44 km) dan rusak berat 9,81% (166,20 km). Sedangkan jalan kabupaten sepanjang 14.669 km dengan kondisi baik 33,80% (4.958 km), sedang 21,36% (3.133, 54 km), rusak ringan 27,06% (3.969,96 km) dan rusak berat 17,77% (2.607,07 km). Melihat data itu, jalan kabupaten yang paling banyak mengalami kerusakan, yakni sebanyak 44,83% (6.677,03 km). Sebanyak 52% jalan daerah rusak. Untuk itu, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan Rp 32,7 triliun untuk perbaikan jalan daerah pada tahun 2023.

Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan terdapat sebanyak 43% dari total panjang ruas jalan di Kabupaten Lampung Selatan yang mengalami rusak berat sehingga memerlukan penanganan secara intensif secepat mungkin dan terdapat sebanyak 4,41% kondisi jalan di Kabupaten Lampung Selatan yang mengalami rusak ringan.

Proses pemeliharaan infrastruktur jalan masih terus dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan, namun ternyata masih banyak terdapat jalan yang terpantau rusak seperti jalan yang berada di daerah Way Arong Kecamatan Kalianda sampai jalan Tugu Patok Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan jalan penghubung antar kecamatan. Kemudian di jalan Kelurahan Way Lubuk yang rusak parah akibat sering dilewati oleh kendaraan yang membawa muatan yang relatif berat yang mengangkut tanah dan batu serta alat berat saat pembuatan ruas jalan tol Sumatera yang semakin memperparah kerusakan yang terjadi di jalan tersebut bahkan hingga saat ini belum di perbaiki dan mengganggu roda perekonomian masyarakat serta memperlambat waktu pengendara karena harus berhati-hati melintasinya agar tidak terjatuh.

Selain itu, menurut informasi yang dihimpun dari lampungpro.co tanggal 07 Januari 2023 jalan rusak juga terjadi di jalan penghubung antara Kecamatan Palas dan Sragi di Desa Suka Randeg, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan dimana hampir semua badan jalan di penuh dengan lubang, jalan yang bergelombang dan tidak beraspal lagi sehingga mobil yang digunakan untuk membawa hasil bumi tidak dapat masuk. Hal ini kemudian berdampak pada

perekonomian masyarakat setempat dimana masyarakat terpaksa membawa hasil bumi dengan cara dipikul atau menggunakan jasa ojek yang akibatnya harga hasil bumi menjadi turun karena biaya angkut kendaraan yang mencapai 30%. Banyaknya lubang-lubang di jalan yang membuat para pengguna jalan harus ekstra hati-hati dan waspada terutama saat turun hujan yang membuat kondisi jalan semakin parah karena terdapat genangan-genangan air yang sering membuat pengguna jalan tidak tahu bahwa di bawah genangan air tersebut terdapat lubang jalan yang cukup dalam sehingga hal ini bisa menjadi indikator meningkatnya terjadi kecelakaan (Fernando, 2019).

Dalam melakukan pemeliharaan jalan Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Lampung Selatan seharusnya tidak hanya fokus pada bagian jalannya saja namun juga harus memperhatikan struktur lain yang menjadi penunjang jalan seperti struktur perkerasan jalan, baju jalan, trotoar, drainase jalan serta struktur lain yang menjadi penunjang dari jalan. Sehingga dari pra observasi yang peneliti lakukan terdapat di beberapa titik jalan yang dalam pemeliharaannya terlihat hanya mengutamakan jalan yang di lalui oleh kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan jalan tersebut tidak bertahan lama dan rusak kembali. Hal ini kemudian membuat masyarakat merasa tidak nyaman karena masyarakat merasa pelayanan yang di berikan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur tidak optimal dan cenderung asal-asalan.

Akibat dari adanya jalan yang sudah di benahi namun rusak kembali ini lah yang menyebabkan timbul berbagai spekulasi yang menganggap pemerintah tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dimana pemerintah hanya menjadikan pembangunan infrastruktur jalan sebagai alasan atas setiap dana yang dialokasikan guna membangun dana memelihara infrastruktur jalan dapat di simpan dan di gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga dana yang semestinya di pakai untuk kepentingan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah tidak di gunakan sesuai dengan semestinya, sehingga masyarakat mempertanyakan apakah pemerintah terutama Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Lampung Selatan sudah bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya atau belum.

Masalah terkait kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Selatan memiliki hubungan erat dengan administrasi negara dalam beberapa hal diantaranya:

1. administrasi negara terlibat dalam alokasi, pemberian anggaran serta penggunaan atas anggaran publik sehingga apabila Dinas Pekerjaan Umum mengalami kendala dalam proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan itu disebabkan oleh masalah anggaran dalam administrasi anggaran.
2. Administrasi negara juga berperan dan bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan kepada Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan pembangunan infrastruktur, hal ini termasuk dalam pemilihan proyek, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Administrasi negara juga berperan dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam Dinas Pekerjaan Umum seperti melakukan pelatihan, rekrutmen serta manajemen personel yang berhubungan dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum.
4. Selanjutnya administrasi negara memiliki peran penting dalam memastikan adanya transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek publik guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam pelaksanaan tugasnya. Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh Dinas Pekerjaan Umum maka itu terjadi karena Kurangnya pengawasan atau akuntabilitas yang lemah oleh pihak administrasi negara. Jadi masalah dalam Kinerja Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Lampung Selatan adalah contoh nyata bagaimana administrasi negara mempunyai hubungan yang erat sehingga dapat berdampak besar dalam keberhasilan atau kegagalan proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan di daerah.

Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan terdapat beberapa bidang di dalamnya salah satunya yaitu bidang yang memiliki tanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan jalan yaitu bidang Bina Marga yang memiliki tugas serta tanggung jawab atas penyiapan perumusan dalam kebijakan teknis, pembinaan serta pelaksanaan dalam bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

Pembangunan dan pemeliharaan jalan yang di lakukan oleh Bidang Bina Marga di bawah wewenang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan menjadi pembahasan menarik terkait fungsi jalan. Bidang Bina Marga tentu saja bertanggung jawab atas permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Sehingga kinerja Bidang Bina Marga dalam pembangunan dan

pemeliharaan jalan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Bidang Bina Marga sendiri mempunyai beberapa permasalahan terkait tugas dan fungsi yang dimilikinya yaitu:

1. Sistem konektivitas daerah yaitu jalan dan jembatan yang belum tersedia secara optimal.
2. Masih banyak kondisi jalan yang rusak berat yang perlu di tangani secara intensif dan cepat.
3. Terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Lampung Selatan yang belum memiliki jalur penghubung seperti jembatan.
4. Akses pendukung kehidupan masyarakat berupa jalan untuk produksi pertanian yang belum tersedia secara optimal sehingga mengakibatkan tingginya ongkos produksi angkut hasil pertanian.
5. Masih kurangnya sarana alat berat dan kondisi peralatan yang sudah berumur tua sehingga sering mengalami kerusakan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan.
6. Belum optimalnya terhadap pengawasan dan pengendalian teknis pekerjaan sehingga hal ini berpengaruh terhadap mutu dan pelayanan infrastruktur yang dibangun di Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah di jabarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lampung Selatan”**. karena peneliti berharap kedepannya kerusakan infrastruktur jalan bisa ditangan dengan lebih cepat dan serius oleh pihak pemerintah sehingga para pengguna jalan dan masyarakat setempat mampu menggunakan fasilitas publik dengan nyaman dan optimal mengingat jalan merupakan sarana yang sangat penting dalam penunjang kegiatan masyarakat sehari-hari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik?

2. Bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lampung Selatan?
3. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lampung Selatan.
3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif sebagai pengetahuan secara akademik bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi kajian khususnya dalam bidang Administrasi Negara yang berhubungan dengan Pelayanan Publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pengembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan di bidang Administrasi Negara khususnya Pelayanan Publik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan saran dan masukan bagi pemerintah terkait pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan terutama untuk Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Lampung Selatan serta diharapkan mampu membantu masyarakat yang

memerlukan informasi mengenai penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Ctk. Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Agus Dwiyanto (2013:178)” H. Achmad Amins, Dr. MM -“Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah” – Editor : Dr. Ir. H. Alisjahbana, MA – penerbit Laksbang Pressindo Jogjakarta. Samarinda 2009.
- Giovani, Devta. 2017. Evaluasi Kinerja DPUPR Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan. Malang. Universitas Brawijaya Malang.
- Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya, Ctk. Pertama, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2011.
- Kasmir. 2016. Manajemen Sumber daya Manusia Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pres.
- Muhammad Fitri Rahmadana, A. T.-a. (2020). Pelayanan Publik. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Novita Tresna, “Efektifitas, Efisiensi Organisasi Publik versus Optimalisasi Pelayanan Publik” dalam Juniarso Ridwan, et.al, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Ctk. Pertama, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009.
- Panjaitan, Megaria Elisabeth. 2015. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Di Kabupaten Toba Samosir. Pekanbaru. Universitas Riau.
- Purwoto, H. dan Kurniawan. 2009. Kajian Dampak Infrastruktur Jalan Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pengembangan Wilayah. Surabaya.
- Ramli Muhammad, 2014, Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Kemanusiaan, Makassar : Alauddin University Press.
- Sudarmanto, 2015, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi Dalam Organisasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Yohanes, Freddie Dan Yurnie. 2016. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan.

Zainal. 2017. KINERJA PEGAWAI DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
TAKALAR.